



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RIANDI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS MWA**
3. NHK : **447981**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.569.650.300**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/96 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.311.790.000
2. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 4.540 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, Rp. 343.140.000
4. Tanah Seluas 173 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, Rp. 174.720.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 735 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, Rp. 325.850.000
6. Tanah Seluas 583 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, Rp. 265.440.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, Rp. 75.855.000
8. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, Rp. 72.855.300

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 351.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 318.970.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.729.498.832
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.969.119.132
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.969.119.132

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.